

2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PER 31 DESEMBER 2023

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- NERACA
- LAPORAN OPERASIONAL
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara

Email : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dengan sebaik- baiknya.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2023.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Putussibau, Februari
2023

Pengguna Anggaran,



MARTHEN, S.T., M.T.
Pembina TK. I
NIP. 19740923 200502 1 001

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Operasional; e) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putussibau, Februari 2023
Pengguna Anggaran,



MARTHEN, S.T., M.T.
Pembina TK. I
NIP. 19740923 200502 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2023 berupa Pendapatan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 111.354.500,00. Realisasi Belanja baik Belanja Operasional maupun Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 229.148.125.425,4 atau mencapai 98,98% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 231.504.119.703,00
2. NERACA menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.681.633.800.285,57 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 17.608.347.176,32 Aset Tetap (netto) sebesar Rp. 1.641.974.214.059,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp. 22.408.611.789,18 Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 357.372.738,93 sehingga ekuitas atau kekayaan bersih per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.681.633.800.285,57.
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah pendapatan sebesar Rp. 111.354.500,00,00 dan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp. 246.783.803.199,20 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 238.748.973.086,43).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 1.695.407.943.550,89 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 239.188.578.014,78) kemudian

- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 228.994.098.971,40 yang sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 1.681.633.800.285,57.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Unaudited*)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69	209.937.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69	209.937.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69	209.937.000,00
5.	BELANJA DAERAH	231.504.119.703,00	229.148.125.425,40	98,98	246.507.132.299,87
5.1.	BELANJA OPERASI	59.876.719.051,00	58.019.278.466,32	96,90	83.432.342.200,13
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.825.195.951,00	7.637.634.834,00	86,54	7.759.509.290,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.483.579.130,00	30.870.291.988,50	98,05	41.872.081.986,00
5.1.05.	Belanja Hibah	19.567.943.970,00	19.511.351.643,82	99,71	33.800.750.924,13
5.2.	BELANJA MODAL	171.627.400.652,00	171.128.846.959,08	99,71	163.074.790.099,74
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.290.000,00	222.855.000,00	97,62	839.714.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.698.336.750,00	52.547.178.100,08	99,71	50.980.150.697,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.700.773.902,00	118.358.813.859,00	99,71	111.254.925.402,74
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(231.129.119.703,00)	(229.036.770.925,40)	99,09	(246.297.195.299,87)

2. NERACA (Unaudited)



KABUPATEN KAPUAS HULU
N E R A C A
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Per 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	Reff	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	ASET	07:04:01		
2	ASET LANCAR	7.4.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.4.1.1.1	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.4.1.1.2	-	0,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.4.1.1.3	-	0,00
7	Kas Lainnya-Kas Di BLUD	7.4.1.1.4	0,00	0,00
8	Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	7.4.1.1.5	0,00	0,00
9	Kas Lainnya-FKTP	7.4.1.1.6	0,00	0,00
10	Kas Lainnya-Sisa Dana BOSDA	7.4.1.1.7	0,00	0,00
11	Kas Lainnya - Jasa Giro	7.4.1.1.8	0,00	
	Kas Lainnya - Saldo PFK		0,00	3.726.430,00
12	Piutang Pajak	7.4.1.1.9	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi	7.4.1.1.10	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.4.1.1.11	0,00	0,00
17	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang BLUD	7.4.1.1.12	0,00	0,00
18	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang Lainnya	7.4.1.1.13	0,00	42.671.954,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.4.1.1.14	-	0,00
20	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	7.4.1.1.15	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	7.4.1.1.16	(0,00)	(213.359,77)
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-	
23	Persediaan	7.4.1.1.17	17.608.347.176,32	41.637.841.565,82
24	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 23)		17.608.347.176,32	41.684.026.590,05
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.4.1.2		
27	Investasi Nonpermanen	7.4.1.2.1		
28	Dana Bergulir		0,00	0,00
29	Penyisihan Dana Bergulir		-	-
30	Jumlah Investasi Nonpermanen (27 s/d 29)		0,00	0,00
32	Investasi Permanen	7.4.1.2.1		
33	Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR			0,00
34	Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu			0,00
35	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas			0,00
36	Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA			0,00
37	Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri			0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
40	Investasi Permanen Lainnya		-	-
41	Jumlah Investasi Permanen (33 s/d40)		0,00	0,00
42	Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 41)		0,00	0,00
No	Uraian	Reff	2023 (Rp)	2022 (Rp)

44	ASET TETAP	7.4.1.3		
45	Tanah	7.4.1.3.1	75.562.053.564,00	75.510.986.143,00
46	Peralatan dan Mesin	7.4.1.3.2	20.147.012.951,17	20.079.039.876,11
47	Gedung dan Bangunan	7.4.1.3.3	75.085.203.125,27	82.631.495.608,76
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.4.1.3.4	3.264.226.866.607,38	3.095.960.390.564,96
49	Aset Tetap Lainnya	7.4.1.3.5	1.375.695.514,68	1.375.695.514,68
50	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.4.1.3.6	132.663.503.703,69	122.305.731.456,01
51	Akumulasi Penyusutan	7.4.1.3.7	(1.927.086.121.407,19)	(1.766.200.364.523,85)
52	Jumlah Aset Tetap (45 s/d 51)		1.641.974.214.059,00	1.631.662.974.639,67
54	DANA CADANGAN			
55	Dana Cadangan		-	-
56	Jumlah Dana Cadangan (55)		-	-
58	ASET LAINNYA	7.4.1.5		
59	Tagihan Penjualan Angsuran	7.4.1.5.1	-	-
60	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
61	Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.2	0,00	0,00
62	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.3	-	-
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.4.1.5.4	-	-
64	Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.5	0,00	0,00
65	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.6	-	-
66	Aset Lain-lain	7.4.1.5.7	155.901.214.007,86	155.959.897.989,86
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.4.1.5.8	(133.492.602.218,68)	(133.551.286.200,68)
67	Kas yang dibatasi Penggunaannya	7.4.1.5.9		
68	Jumlah Aset Lainnya (59 s/d 67)		22.408.611.789,18	22.408.611.789,18
69	JUMLAH ASET (24 + 42 + 52 + 56 + 68)		1.681.991.173.024,50	1.695.755.613.018,90
71	KEWAJIBAN	07:04:02		
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.4.2.1		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
74	Utang Bunga		-	-
75	Utang Jasa Medis		-	-
76	Utang Belanja	7.4.2.1.3	357.372.738,93	347.669.468,01
77	Utang Jangka Pendek- Utang Kelebihan Transfer		-	-
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.4.2.1.3	-	-
80	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (73 s/d 78)		357.372.738,93	347.669.468,01
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.4.2.2		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 s/d 87)		-	-
89	JUMLAH KEWAJIBAN (80 + 88)		357.372.738,93	347.669.468,01
90	EKUITAS DANA			
91	JUMLAH EKUITAS DANA	07:04:03	1.681.633.800.285,57	1.695.407.943.550,89
92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	07:04:04	1.681.991.173.024,50	1.695.755.613.018,90

3. LAPORAN OPERASIONAL (*Unaudited*)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Reff	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	111.354.500,00	209.937.000,00
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.3	0,00	
Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.1.1.4	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		111.354.500,00	209.937.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	
Dana Alokasi Umum		0,00	
Dana Alokasi Khusus		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Insentif Desa (DID)		0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00
Dana Penyesuaian		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	
Pendapatan Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Jumlah Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3		
Pendapatan Hibah - Sumbangan Pihak Ketiga		7.923.262.253,00	
Pendapatan Hibah Provinsi		0,00	
Lain-Lain Pendapatan		0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		7.923.262.253,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		8.034.616.753,00	209.937.000,00
BEBAN OPERASI	7.5.2.1		
Beban Pegawai	7.5.2.1.1	7.587.329.274,00	7.883.975.490,00
Beban Persediaan	7.5.2.1.2	2.250.936.029,00	2.817.229.944,26

Beban Jasa	7.5.2.1.3	6.226.781.028,00	7.763.606.238,00
Beban Pemeliharaan	7.5.2.1.4	3.124.778.866,31	2.703.574.061,29
Beban Perjalanan Dinas	7.5.2.1.5	7.332.565.764,00	8.990.067.184,00
Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.6		
Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.7	12.323.916.450,00	21.776.332.000,00
Beban Subsidi	7.5.2.1.8	0,00	
Beban Penyisihan Piutang	7.5.2.1.9	0,00	
Beban Penyusutan	7.5.2.1.10	164.422.642.369,56	155.120.681.549,20
Beban Amortisasi	7.5.2.1.11	0,00	
Beban Hibah	7.5.2.1.12	43.400.500.818,32	9.904.731.234,08
Beban Bansos	7.5.2.1.13	0,00	
Beban Beasiswa	7.5.2.1.14	0,00	
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	7.5.2.1.15	114.352.600,00	363.190.626,00
Beban Ekstrakomptabel	7.5.2.1.16	0,00	44.927.237,62
Beban Lain-lain	7.5.2.1.17	0,00	
Jumlah Beban Operasi		246.783.803.199,20	217.368.315.564,46
			0,00
BEBAN TRANSFER	7.5.2.2		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak			
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
Beban Transfer Keuangan Lainnya			
Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		246.783.803.199,20	217.368.315.564,46
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.03	(238.749.186.446,20)	(217.158.378.564,46)
SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	439.818.288,12	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		213.359,77	
Jumlah Surplus Non Operasional		213.359,77	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(439.604.928,35)	
Jumlah Defisit Non Operasional		(439.604.928,35)	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(439.391.568,58)	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(239.188.578.014,78)	(217.158.378.564,46)
PENDAPATAN LUAR BIASA	07:05:05		
Pendapatan Luar Biasa		0,00	
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	07:05:06	(239.188.578.014,78)	(217.158.591.924,23)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Unaudited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1				
2	EKUITAS AWAL	7.3.6.1	1.695.407.943.550,89	1.714.756.739.527,91
3	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.3.6.2		
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	7.3.6.3	(239.188.578.014,78)	(217.158.591.924,23)
4	KEBIJAKAN/			
5	KESALAHAN MENDASAR :	7.3.6.3.1	-	
6	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7.3.6.3.2	-	
7	Koreksi Kas Daerah	7.3.6.3.3	-	
8	Koreksi Kas di Bendahara	7.3.6.3.4	-	
9	Koreksi Kas Lainnya	7.3.6.3.5	-	
10	Koreksi Piutang	7.3.6.3.6	-	
11	Koreksi Penyisihan Piutang	7.3.6.3.7	-	
12	Koreksi Nilai Persediaan	7.3.6.3.8	(13.491.216,00)	
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	7.3.6.3.9	-	
14	Koreksi Investasi Jangka Panjang	7.3.6.3.10	-	
15	Koreksi Aset Tetap	7.3.6.3.11	(6.576.538.179,80)	(42.308.643.852,77)
16	Koreksi Penyusutan	7.3.6.3.12	3.010.365.173,85	(6.183.772.183,11)
17	Koreksi Aset lainnya	7.3.6.3.13	-	
18	Koreksi Penyusutan Aset lainnya	7.3.6.3.14	-	
19	Koreksi Ganti Rugi Perbendaharaan	7.3.6.3.15	-	
20	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi	7.3.6.3.16	-	
21	Koreksi Amortisasi	7.3.6.3.17	-	
22	Koreksi Kewajiban jangka Pendek	7.3.6.3.18	-	5.016.683,22
23	Koreksi Kewajiban jangka Panjang	7.3.6.3.19	-	
24	RK-PPKD		228.994.098.971,40	246.297.195.299,87
	EKUITAS AKHIR	7.7.4	1.681.633.800.285,57	1.695.407.943.550,89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu per Desember 2023. yang meliputi aset, baik aset lancar maupun aset tetap, kewajiban, ekuitas dan realisasi pendapatan dan belanja LRA, Pendapatan dan Beban LO yang terjadi selama Tahun 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu serta menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna laporan keuangan ini dalam mengambil suatu keputusan.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, berpedoman pada dasar-dasar hukum dibawah ini :

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
 5. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-pos LRA

4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3. Penjelasan Pos-pos LO

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

Dari 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan tingkat pencapaian target kinerja Keuangan secara keseluruhan 98,98% dari rencana target 100% yaitu Anggaran sebesar Rp. 231.504.119.703,00 dengan realisasi Rp. 229.148.125.425,40 Terdiri dari Realisasi Belanja Operasi Rp. 58.019.278.466,32 atau 96,90% dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 171.128.846.959,08 atau 99,71% dengan Rincian Tiap Kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.03.1.03.0.00.0.00.01.000000.00.5.	BELANJA DAERAH	231.504.119.703,00	229.148.125.425,40	98,98
1.03.1.03.0.00.0.00.01.000000.00.5.1.01	BELANJA PEGAWAI	8.825.195.951,00	7.637.634.834,00	86,54
1.03.1.03.0.00.0.00.01.000000.00.5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	31.483.579.130,00	30.870.291.988,50	98,05
1.03.1.03.0.00.0.00.01.000000.00.5.1.05	BELANJA HIBAH	19.567.943.970,00	19.511.351.643,82	99,71
1.03.1.03.0.00.0.00.01.000000.0.5.2.	BELANJA MODAL	171.627.400.652,00	171.128.846.959,08	99,70
1.03.1.03.0.001.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.880.348.281,00	17.344.792.455,00	91,86
1.03.1.03.0.001.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.650.000,00	11.500.000,00	98,71
1.03.1.03.0.001.2.01.015.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	11.500.000,00	98,71
1.03.1.03.0.001.2.01.015.1.02.01.	Belanja Barang	11.650.000,00	11.500.000,00	98,71
1.03.1.03.0.001.2.01.015.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	11.650.000,00	11.500.000,00	98,71
1.03.1.03.0.001.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.150.000,00	6.100.000,00	99,18
1.03.1.03.0.001.2.01.025.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	6.100.000,00	99,18
1.03.1.03.0.001.2.01.025.1.02.01.	Belanja Barang	6.150.000,00	6.100.000,00	99,18
1.03.1.03.0.001.2.01.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.150.000,00	6.100.000,00	99,18

1.03.1.03.0.001.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.900.000,00	5.800.000,00	98,30
1.03.1.03.0.001.2.01.035.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.800.000,00	98,30
1.03.1.03.0.001.2.01.035.1.02.01.	Belanja Barang	5.900.000,00	5.800.000,00	98,30
1.03.1.03.0.001.2.01.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.900.000,00	5.800.000,00	98,30
1.03.1.03.0.001.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.550.000,00	6.500.000,00	99,23
1.03.1.03.0.001.2.01.045.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.500.000,00	99,23
1.03.1.03.0.001.2.01.045.1.02.01.	Belanja Barang	6.550.000,00	6.500.000,00	99,23
1.03.1.03.0.001.2.01.045.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.550.000,00	6.500.000,00	99,23
1.03.1.03.0.001.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.900.000,00	5.800.000,00	98,30
1.03.1.03.0.001.2.01.055.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.800.000,00	98,30
1.03.1.03.0.001.2.01.055.1.02.01.	Belanja Barang	5.900.000,00	5.800.000,00	98,30
1.03.1.03.0.001.2.01.055.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.900.000,00	5.800.000,00	98,30
1.03.1.03.0.001.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.590.000,00	3.540.000,00	98,60
1.03.1.03.0.001.2.01.065.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.590.000,00	3.540.000,00	98,60
1.03.1.03.0.001.2.01.065.1.02.01.	Belanja Barang	3.590.000,00	3.540.000,00	98,60
1.03.1.03.0.001.2.01.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.590.000,00	3.540.000,00	98,60
1.03.1.03.0.001.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.650.000,00	11.500.000,00	98,71
1.03.1.03.0.001.2.01.075.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	11.500.000,00	98,71
1.03.1.03.0.001.2.01.075.1.02.01.	Belanja Barang	11.650.000,00	11.500.000,00	98,71
1.03.1.03.0.001.2.01.075.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	11.650.000,00	11.500.000,00	98,71
1.03.1.03.0.001.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.783.115.951,00	6.602.834.834,00	84,83
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01	Belanja Pegawai	7.783.115.951,00	6.602.834.834,00	84,83
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.517.249.066,00	4.480.492.018,00	81,20
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.037.932.565,00	3.272.431.980,00	81,04
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	462.601.843,00	359.320.460,00	77,67
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.898.250,00	160.305.000,00	99,63
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	130.454.250,00	129.990.000,00	99,64
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	141.295.750,00	95.270.000,00	67,42
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	291.113.916,00	219.649.860,00	75,45
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	501.870,00	499.928,00	99,61
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	83.585,00	52.964,00	63,36

1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	258.331.624,00	216.178.600,00	83,68
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.508.895,00	6.698.287,00	78,72
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.526.518,00	20.094.939,00	78,72
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.265.866.885,00	2.122.342.816,00	93,66
1.03.1.03.0.001.2.02.015.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.265.866.885,00	2.122.342.816,00	93,66
1.03.1.03.0.001.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.025.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.025.1.02.01.	Belanja Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.118.680.000,00	1.109.180.000,00	99,15
1.03.1.03.0.001.2.02.035.1.01	Belanja Pegawai	1.042.080.000,00	1.034.800.000,00	99,30
1.03.1.03.0.001.2.02.035.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.600.000,00	74.380.000,00	97,10
1.03.1.03.0.001.2.02.035.1.02.01.	Belanja Barang	17.200.000,00	17.080.000,00	99,30
1.03.1.03.0.001.2.02.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	17.200.000,00	17.080.000,00	99,30
1.03.1.03.0.001.2.02.035.1.02.02.	Belanja Jasa	59.400.000,00	57.300.000,00	96,46
1.03.1.03.0.001.2.02.035.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	59.400.000,00	57.300.000,00	96,46
1.03.1.03.0.001.2.02.04	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	4.640.000,00	4.640.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.045.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.045.1.02.01.	Belanja Barang	4.640.000,00	4.640.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.045.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.640.000,00	4.640.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.900.000,00	9.894.000,00	99,93
1.03.1.03.0.001.2.02.055.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.894.000,00	99,93
1.03.1.03.0.001.2.02.055.1.02.01.	Belanja Barang	9.900.000,00	9.894.000,00	99,93
1.03.1.03.0.001.2.02.055.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	9.900.000,00	9.894.000,00	99,93
1.03.1.03.0.001.2.02.06	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.065.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.065.1.02.01.	Belanja Barang	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00

1.03.1.03.0.001.2.02.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	16.550.000,00	16.475.000,00	99,54
1.03.1.03.0.001.2.02.075.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	16.475.000,00	99,54
1.03.1.03.0.001.2.02.075.1.02.01.	Belanja Barang	16.550.000,00	16.475.000,00	99,54
1.03.1.03.0.001.2.02.075.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	16.550.000,00	16.475.000,00	99,54
1.03.1.03.0.001.2.03.06	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	67.125.000,00	66.350.000,00	98,84
1.03.1.03.0.001.2.03.065.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.125.000,00	66.350.000,00	98,84
1.03.1.03.0.001.2.03.065.1.02.01.	Belanja Barang	11.325.000,00	11.300.000,00	99,77
1.03.1.03.0.001.2.03.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	11.325.000,00	11.300.000,00	99,77
1.03.1.03.0.001.2.03.065.1.02.02.	Belanja Jasa	55.800.000,00	55.050.000,00	98,65
1.03.1.03.0.001.2.03.065.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	55.050.000,00	98,65
1.03.1.03.0.001.2.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.05.025.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.05.025.1.02.01.	Belanja Barang	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.05.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	11.450.000,00	11.400.000,00	99,56
1.03.1.03.0.001.2.05.035.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	11.400.000,00	99,56
1.03.1.03.0.001.2.05.035.1.02.01.	Belanja Barang	11.450.000,00	11.400.000,00	99,56
1.03.1.03.0.001.2.05.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	11.450.000,00	11.400.000,00	99,56
1.03.1.03.0.001.2.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	419.242.000,00	273.278.782,00	65,18
1.03.1.03.0.001.2.05.095.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.242.000,00	273.278.782,00	65,18
1.03.1.03.0.001.2.05.095.1.02.02.	Belanja Jasa	170.000.000,00	114.352.600,00	67,26
1.03.1.03.0.001.2.05.095.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	170.000.000,00	114.352.600,00	67,26
1.03.1.03.0.001.2.05.095.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	249.242.000,00	158.926.182,00	63,76
1.03.1.03.0.001.2.05.095.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	249.242.000,00	158.926.182,00	63,76
1.03.1.03.0.001.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	49.905.000,00	49.905.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.06.015.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.905.000,00	49.905.000,00	100,00

1.03.1.03.0.001.2.06.015.1.02.01.	Belanja Barang	49.905.000,00	49.905.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.06.015.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	49.905.000,00	49.905.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	457.805.000,00	431.624.799,00	94,28
1.03.1.03.0.001.2.06.025.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.805.000,00	431.624.799,00	94,28
1.03.1.03.0.001.2.06.025.1.02.01.	Belanja Barang	457.805.000,00	431.624.799,00	94,28
1.03.1.03.0.001.2.06.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	457.805.000,00	431.624.799,00	94,28
1.03.1.03.0.001.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	56.975.600,00	56.975.600,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.06.035.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.975.600,00	56.975.600,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.06.035.1.02.01.	Belanja Barang	56.975.600,00	56.975.600,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.06.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	56.975.600,00	56.975.600,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	127.871.500,00	127.847.000,00	99,98
1.03.1.03.0.001.2.06.055.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.871.500,00	127.847.000,00	99,98
1.03.1.03.0.001.2.06.055.1.02.01.	Belanja Barang	127.871.500,00	127.847.000,00	99,98
1.03.1.03.0.001.2.06.055.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	127.871.500,00	127.847.000,00	99,98
1.03.1.03.0.001.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	134.201.400,00	133.466.900,00	99,45
1.03.1.03.0.001.2.06.065.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.201.400,00	133.466.900,00	99,45
1.03.1.03.0.001.2.06.065.1.02.01.	Belanja Barang	70.001.400,00	69.696.900,00	99,56
1.03.1.03.0.001.2.06.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	70.001.400,00	69.696.900,00	99,56
1.03.1.03.0.001.2.06.065.1.02.02.	Belanja Jasa	64.200.000,00	63.770.000,00	99,33
1.03.1.03.0.001.2.06.065.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	64.200.000,00	63.770.000,00	99,33
1.03.1.03.0.001.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.619.900.000,00	2.578.564.582,00	98,42
1.03.1.03.0.001.2.06.095.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.619.900.000,00	2.578.564.582,00	98,42
1.03.1.03.0.001.2.06.095.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.619.900.000,00	2.578.564.582,00	98,42
1.03.1.03.0.001.2.06.095.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.619.900.000,00	2.578.564.582,00	98,42
1.03.1.03.0.001.2.06.10	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	9.035.000,00	9.020.000,00	99,83
1.03.1.03.0.001.2.06.105.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.035.000,00	9.020.000,00	99,83
1.03.1.03.0.001.2.06.105.1.02.01.	Belanja Barang	9.035.000,00	9.020.000,00	99,83
1.03.1.03.0.001.2.06.105.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	9.035.000,00	9.020.000,00	99,83
1.03.1.03.0.001.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	170.400.000,00	165.045.000,00	96,85
1.03.1.03.0.001.2.07.065.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.400.000,00	165.045.000,00	96,85
1.03.1.03.0.001.2.07.065.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	170.400.000,00	165.045.000,00	96,85

1.03.1.03.0.001.2.07.065.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	110.400.000,00	109.200.000,00	98,91
1.03.1.03.0.001.2.07.065.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	60.000.000,00	55.845.000,00	93,07
1.03.1.03.0.001.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.08.015.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.08.015.1.02.01.	Belanja Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.08.015.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	286.000.000,00	280.083.918,00	97,93
1.03.1.03.0.001.2.08.025.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.000.000,00	280.083.918,00	97,93
1.03.1.03.0.001.2.08.025.1.02.02.	Belanja Jasa	286.000.000,00	280.083.918,00	97,93
1.03.1.03.0.001.2.08.025.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	286.000.000,00	280.083.918,00	97,93
1.03.1.03.0.001.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.130.477.860,00	4.059.197.610,00	98,27
1.03.1.03.0.001.2.08.045.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.130.477.860,00	4.059.197.610,00	98,27
1.03.1.03.0.001.2.08.045.1.02.01.	Belanja Barang	443.520.000,00	418.768.750,00	94,41
1.03.1.03.0.001.2.08.045.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	443.520.000,00	418.768.750,00	94,41
1.03.1.03.0.001.2.08.045.1.02.02.	Belanja Jasa	3.686.957.860,00	3.640.428.860,00	98,73
1.03.1.03.0.001.2.08.045.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.527.300.000,00	3.487.550.000,00	98,87
1.03.1.03.0.001.2.08.045.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	159.657.860,00	152.878.860,00	95,75
1.03.1.03.0.001.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.009.543.970,00	962.129.430,00	95,30
1.03.1.03.0.001.2.09.025.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.009.543.970,00	962.129.430,00	95,30
1.03.1.03.0.001.2.09.025.1.02.01.	Belanja Barang	663.973.970,00	642.644.980,00	96,78
1.03.1.03.0.001.2.09.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	663.973.970,00	642.644.980,00	96,78
1.03.1.03.0.001.2.09.025.1.02.02.	Belanja Jasa	43.200.000,00	39.374.000,00	91,14
1.03.1.03.0.001.2.09.025.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	32.174.000,00	89,37
1.03.1.03.0.001.2.09.025.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.09.025.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	302.370.000,00	280.110.450,00	92,63
1.03.1.03.0.001.2.09.025.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.370.000,00	280.110.450,00	92,63
1.03.1.03.0.001.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	142.940.000,00	142.940.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.09.065.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.940.000,00	142.940.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.09.065.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	142.940.000,00	142.940.000,00	100,00
1.03.1.03.0.001.2.09.065.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.940.000,00	142.940.000,00	100,00

1.03.1.03.0.002.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.341.697.600,00	1.340.967.610,00	99,94
1.03.1.03.0.002.2.01.35	PENINGKATAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	521.470.240,00	521.009.400,00	99,91
1.03.1.03.0.002.2.01.355.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	521.470.240,00	521.009.400,00	99,91
1.03.1.03.0.002.2.01.355.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	521.470.240,00	521.009.400,00	99,91
1.03.1.03.0.002.2.01.355.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	521.470.240,00	521.009.400,00	99,91
1.03.1.03.0.002.2.02.08	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	62.950.000,00	62.950.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.085.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.950.000,00	62.950.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.085.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	62.950.000,00	62.950.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.085.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	62.950.000,00	62.950.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.14	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	557.809.150,00	557.540.000,00	99,95
1.03.1.03.0.002.2.02.145.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.975.000,00	457.840.000,00	99,97
1.03.1.03.0.002.2.02.145.1.02.02.	Belanja Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.145.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.145.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	439.375.000,00	439.240.000,00	99,96
1.03.1.03.0.002.2.02.145.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	439.375.000,00	439.240.000,00	99,96
1.03.1.03.0.002.2.02.145.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.834.150,00	99.700.000,00	99,86
1.03.1.03.0.002.2.02.145.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	99.834.150,00	99.700.000,00	99,86
1.03.1.03.0.002.2.02.145.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	99.834.150,00	99.700.000,00	99,86
1.03.1.03.0.002.2.02.21	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	199.468.210,00	199.468.210,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.215.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.215.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.215.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.215.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.468.210,00	99.468.210,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.215.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	99.468.210,00	99.468.210,00	100,00
1.03.1.03.0.002.2.02.215.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	99.468.210,00	99.468.210,00	100,00
1.03.1.03.0.003.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.800.379.000,00	8.781.614.250,00	99,78
1.03.1.03.0.003.2.01.01	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	118.950.000,00	114.645.000,00	96,38
1.03.1.03.0.003.2.01.015.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.950.000,00	114.645.000,00	96,38

1.03.1.03.0.003.2.01.015.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	118.950.000,00	114.645.000,00	96,38
1.03.1.03.0.003.2.01.015.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	118.950.000,00	114.645.000,00	96,38
1.03.1.03.0.003.2.01.02	SUPERVISI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/ PERLUASAN/PERBAIKAN SPAM	10.000.000,00	9.973.350,00	99,73
1.03.1.03.0.003.2.01.025.1.05	Belanja Hibah	10.000.000,00	9.973.350,00	99,73
1.03.1.03.0.003.2.01.025.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000,00	9.973.350,00	99,73
1.03.1.03.0.003.2.01.025.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	9.973.350,00	99,73
1.03.1.03.0.003.2.01.04	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN	867.335.000,00	860.700.000,00	99,23
1.03.1.03.0.003.2.01.045.1.02	Belanja Barang dan Jasa	867.335.000,00	860.700.000,00	99,23
1.03.1.03.0.003.2.01.045.1.02.02.	Belanja Jasa	66.000.000,00	60.450.000,00	91,59
1.03.1.03.0.003.2.01.045.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	60.450.000,00	91,59
1.03.1.03.0.003.2.01.045.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	42.225.000,00	41.140.000,00	97,43
1.03.1.03.0.003.2.01.045.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.225.000,00	41.140.000,00	97,43
1.03.1.03.0.003.2.01.045.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	759.110.000,00	759.110.000,00	100,00
1.03.1.03.0.003.2.01.045.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	759.110.000,00	759.110.000,00	100,00
1.03.1.03.0.003.2.01.06	PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN	261.300.000,00	261.071.900,00	99,91
1.03.1.03.0.003.2.01.065.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	36.240.000,00	99,83
1.03.1.03.0.003.2.01.065.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	36.300.000,00	36.240.000,00	99,83
1.03.1.03.0.003.2.01.065.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.300.000,00	36.240.000,00	99,83
1.03.1.03.0.003.2.01.065.1.05	Belanja Hibah	225.000.000,00	224.831.900,00	99,92
1.03.1.03.0.003.2.01.065.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.000.000,00	224.831.900,00	99,92
1.03.1.03.0.003.2.01.065.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan	225.000.000,00	224.831.900,00	99,92

	Peraturan Perundang-Undangan			
1.03.1.03.0.003.2.01.11	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN SPAM OLEH PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT	32.700.000,00	25.490.000,00	77,95
1.03.1.03.0.003.2.01.115.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	25.490.000,00	77,95
1.03.1.03.0.003.2.01.115.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	32.700.000,00	25.490.000,00	77,95
1.03.1.03.0.003.2.01.115.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.700.000,00	25.490.000,00	77,95
1.03.1.03.0.003.2.01.19	PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN	7.510.094.000,00	7.509.734.000,00	99,99
1.03.1.03.0.003.2.01.195.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.510.094.000,00	7.509.734.000,00	99,99
1.03.1.03.0.003.2.01.195.1.02.02.	Belanja Jasa	364.200.000,00	364.200.000,00	100,00
1.03.1.03.0.003.2.01.195.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	364.200.000,00	364.200.000,00	100,00
1.03.1.03.0.003.2.01.195.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	261.425.000,00	261.065.000,00	99,86
1.03.1.03.0.003.2.01.195.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	261.425.000,00	261.065.000,00	99,86
1.03.1.03.0.003.2.01.195.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.884.469.000,00	6.884.469.000,00	100,00
1.03.1.03.0.003.2.01.195.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.884.469.000,00	6.884.469.000,00	100,00
1.03.1.03.0.005.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.247.846.000,00	5.175.331.450,00	98,61
1.03.1.03.0.005.2.01.01	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	113.900.000,00	106.235.000,00	93,27
1.03.1.03.0.005.2.01.015.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.900.000,00	106.235.000,00	93,27
1.03.1.03.0.005.2.01.015.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	113.900.000,00	106.235.000,00	93,27
1.03.1.03.0.005.2.01.015.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.900.000,00	106.235.000,00	93,27
1.03.1.03.0.005.2.01.06	PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT	5.106.471.000,00	5.057.966.450,00	99,05
1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.106.471.000,00	5.057.966.450,00	99,05
1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02.01.	Belanja Barang	59.760.000,00	18.984.000,00	31,76
1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	59.760.000,00	18.984.000,00	31,76
1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02.02.	Belanja Jasa	193.050.000,00	192.650.000,00	99,79
1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	193.050.000,00	192.650.000,00	99,79

1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	173.323.550,00	165.995.000,00	95,77
1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	173.323.550,00	165.995.000,00	95,77
1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.680.337.450,00	4.680.337.450,00	100,00
1.03.1.03.0.005.2.01.065.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.680.337.450,00	4.680.337.450,00	100,00
1.03.1.03.0.005.2.01.08	SOSIALISASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERKAIT PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	27.475.000,00	11.130.000,00	40,50
1.03.1.03.0.005.2.01.085.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.475.000,00	11.130.000,00	40,50
1.03.1.03.0.005.2.01.085.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	27.475.000,00	11.130.000,00	40,50
1.03.1.03.0.005.2.01.085.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.475.000,00	11.130.000,00	40,50
1.03.1.03.0.006.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.019.936.000,00	1.019.936.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.06	PENINGKATAN SALURAN DRAINASE PERKOTAAN	276.546.000,00	276.546.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.065.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	276.546.000,00	276.546.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.065.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	276.546.000,00	276.546.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.065.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	276.546.000,00	276.546.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.13	PENINGKATAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN	382.770.000,00	382.770.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.135.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	382.770.000,00	382.770.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.135.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	382.770.000,00	382.770.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.135.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	382.770.000,00	382.770.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.14	REHABILITASI SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN	360.620.000,00	360.620.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.145.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	360.620.000,00	360.620.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.145.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	360.620.000,00	360.620.000,00	100,00
1.03.1.03.0.006.2.01.145.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	360.620.000,00	360.620.000,00	100,00
1.03.1.03.0.008.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	58.162.986.378,00	57.947.323.308,08	99,62
1.03.1.03.0.008.2.01.01	PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	130.350.000,00	117.760.000,00	90,34
1.03.1.03.0.008.2.01.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.350.000,00	117.760.000,00	90,34

1.03.1.03.0.008.2.01.015.1.02.02.	Belanja Jasa	102.400.000,00	90.400.000,00	88,28
1.03.1.03.0.008.2.01.015.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	102.400.000,00	90.400.000,00	88,28
1.03.1.03.0.008.2.01.015.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	27.950.000,00	27.360.000,00	97,88
1.03.1.03.0.008.2.01.015.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.950.000,00	27.360.000,00	97,88
1.03.1.03.0.008.2.01.02	PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.032.636.378,00	57.829.563.308,08	99,65
1.03.1.03.0.008.2.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.050.000,00	35.475.000,00	52,90
1.03.1.03.0.008.2.01.025.1.02.02.	Belanja Jasa	36.000.000,00	12.600.000,00	35,00
1.03.1.03.0.008.2.01.025.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	12.600.000,00	35,00
1.03.1.03.0.008.2.01.025.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	31.050.000,00	22.875.000,00	73,67
1.03.1.03.0.008.2.01.025.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.050.000,00	22.875.000,00	73,67
1.03.1.03.0.008.2.01.025.1.05.	Belanja Hibah	5.267.249.628,00	5.246.910.208,00	99,61
1.03.1.03.0.008.2.01.025.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.267.249.628,00	5.246.910.208,00	99,61
1.03.1.03.0.008.2.01.025.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.267.249.628,00	5.246.910.208,00	99,61
1.03.1.03.0.008.2.01.025.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.698.336.750,00	52.547.178.100,08	99,71
1.03.1.03.0.008.2.01.025.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	52.518.336.750,00	52.367.328.100,08	99,71
1.03.1.03.0.008.2.01.025.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.518.336.750,00	52.367.328.100,08	99,71
1.03.1.03.0.008.2.01.025.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	180.000.000,00	179.850.000,00	99,91
1.03.1.03.0.008.2.01.025.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	180.000.000,00	179.850.000,00	99,91
1.03.1.03.0.009.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	17.794.700.024,00	17.753.811.392,82	99,77
1.03.1.03.0.009.2.01.02	SUPERVISI PENATAAN/PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	990.983.126,00	986.792.000,00	99,57
1.03.1.03.0.009.2.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	214.700.000,00	214.515.000,00	99,91
1.03.1.03.0.009.2.01.025.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	214.700.000,00	214.515.000,00	99,91
1.03.1.03.0.009.2.01.025.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	214.700.000,00	214.515.000,00	99,91
1.03.1.03.0.009.2.01.025.1.05.	Belanja Hibah	496.283.126,00	493.820.000,00	99,50
1.03.1.03.0.009.2.01.025.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	96.283.126,00	95.975.000,00	99,67
1.03.1.03.0.009.2.01.025.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	96.283.126,00	95.975.000,00	99,67
1.03.1.03.0.009.2.01.025.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	397.845.000,00	99,46
1.03.1.03.0.009.2.01.025.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga	400.000.000,00	397.845.000,00	99,46

	Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
1.03.1.03.0.009.2.01.025.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.000.000,00	278.457.000,00	99,44
1.03.1.03.0.009.2.01.025.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	280.000.000,00	278.457.000,00	99,44
1.03.1.03.0.009.2.01.025.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	280.000.000,00	278.457.000,00	99,44
1.03.1.03.0.009.2.01.03	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	15.643.716.898,00	15.607.439.867,82	99,76
1.03.1.03.0.009.2.01.035.1.02	Belanja Barang dan Jasa	653.600.000,00	653.065.000,00	99,91
1.03.1.03.0.009.2.01.035.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	653.600.000,00	653.065.000,00	99,91
1.03.1.03.0.009.2.01.035.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	653.600.000,00	653.065.000,00	99,91
1.03.1.03.0.009.2.01.035.1.05	Belanja Hibah	13.569.411.216,00	13.535.816.185,82	99,75
1.03.1.03.0.009.2.01.035.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.940.000.000,00	1.933.998.469,82	99,69
1.03.1.03.0.009.2.01.035.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.940.000.000,00	1.933.998.469,82	99,69
1.03.1.03.0.009.2.01.035.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.629.411.216,00	11.601.817.716,00	99,76
1.03.1.03.0.009.2.01.035.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.629.411.216,00	11.601.817.716,00	99,76
1.03.1.03.0.009.2.01.035.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.420.705.682,00	1.418.558.682,00	99,84
1.03.1.03.0.009.2.01.035.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.420.705.682,00	1.418.558.682,00	99,84
1.03.1.03.0.009.2.01.035.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	1.420.705.682,00	1.418.558.682,00	99,84
1.03.1.03.0.009.2.01.04	PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	1.160.000.000,00	1.159.579.525,00	99,96
1.03.1.03.0.009.2.01.045.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000.000,00	1.159.579.525,00	99,96
1.03.1.03.0.009.2.01.045.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	856.700.000,00	856.639.525,00	99,99
1.03.1.03.0.009.2.01.045.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	856.700.000,00	856.639.525,00	99,99
1.03.1.03.0.009.2.01.045.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	303.300.000,00	302.940.000,00	99,88
1.03.1.03.0.009.2.01.045.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	303.300.000,00	302.940.000,00	99,88
1.03.1.03.0.010.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	118.993.444.620,00	118.603.223.959,50	99,67
1.03.1.03.0.010.2.01.01	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	794.152.275,00	794.152.275,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.015.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.810.000,00	300.810.000,00	100,00

1.03.1.03.0.010.2.01.015.1.02.02.	Belanja Jasa	300.810.000,00	300.810.000,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.015.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.810.000,00	300.810.000,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.015.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	493.342.275,00	493.342.275,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.015.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	493.342.275,00	493.342.275,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.015.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	493.342.275,00	493.342.275,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.04.	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	499.500.000,00	499.500.000,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	499.500.000,00	499.500.000,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.045.1.02.02.	Belanja Jasa	499.500.000,00	499.500.000,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.045.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	499.500.000,00	499.500.000,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.08.	REKONSTRUKSI JALAN	108.927.059.868,00	108.671.173.704,00	99,76
1.03.1.03.0.010.2.01.085.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.328.350.000,00	1.281.205.000,00	96,45
1.03.1.03.0.010.2.01.085.1.02.02.	Belanja Jasa	70.650.000,00	70.650.000,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.085.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	70.650.000,00	70.650.000,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.085.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.257.700.000,00	1.210.555.000,00	96,25
1.03.1.03.0.010.2.01.085.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.257.700.000,00	1.210.555.000,00	96,25
1.03.1.03.0.010.2.01.085.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.598.709.868,00	107.389.968.704,00	99,80
1.03.1.03.0.010.2.01.085.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	107.598.709.868,00	107.389.968.704,00	99,80
1.03.1.03.0.010.2.01.085.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	107.598.709.868,00	107.389.968.704,00	99,80
1.03.1.03.0.010.2.01.10.	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	444.996.109,00	444.996.109,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.105.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	444.996.109,00	444.996.109,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.105.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	444.996.109,00	444.996.109,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.105.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	444.996.109,00	444.996.109,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.12.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	975.085.304,00	975.085.304,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.125.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	975.085.304,00	975.085.304,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.125.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	975.085.304,00	975.085.304,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.125.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	975.085.304,00	975.085.304,00	100,00
1.03.1.03.0.010.2.01.21.	PENANGGULANGAN BENCANA/TANGGAP DARURAT	6.328.010.144,00	6.200.224.567,50	97,98
1.03.1.03.0.010.2.01.215.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.668.375.000,00	1.662.974.392,50	99,67
1.03.1.03.0.010.2.01.215.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	1.233.000.000,00	1.230.074.392,50	99,76
1.03.1.03.0.010.2.01.215.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.233.000.000,00	1.230.074.392,50	99,76
1.03.1.03.0.010.2.01.215.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	435.375.000,00	432.900.000,00	99,43
1.03.1.03.0.010.2.01.215.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	435.375.000,00	432.900.000,00	99,43
1.03.1.03.0.010.2.01.215.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.659.635.144,00	4.537.250.175,00	97,37

1.03.1.03.0.010.2.01.215.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.659.635.144,00	4.537.250.175,00	97,37
1.03.1.03.0.010.2.01.215.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	4.659.635.144,00	4.537.250.175,00	97,37
1.03.1.03.0.010.2.01.23	PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN	1.024.640.920,00	1.018.092.000,00	99,36
1.03.1.03.0.010.2.01.235.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.024.640.920,00	1.018.092.000,00	99,36
1.03.1.03.0.010.2.01.235.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.024.640.920,00	1.018.092.000,00	99,36
1.03.1.03.0.010.2.01.235.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	1.024.640.920,00	1.018.092.000,00	99,36
1.03.1.03.0.011.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	598.685.800,00	578.094.000,00	96,56
1.03.1.03.0.011.2.01.04	PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	50.525.800,00	49.605.000,00	98,17
1.03.1.03.0.011.2.01.045.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.525.800,00	49.605.000,00	98,17
1.03.1.03.0.011.2.01.045.1.02.01.	Belanja Barang	13.625.800,00	12.705.000,00	93,24
1.03.1.03.0.011.2.01.045.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	13.625.800,00	12.705.000,00	93,24
1.03.1.03.0.011.2.01.045.1.02.02.	Belanja Jasa	36.900.000,00	36.900.000,00	100,00
1.03.1.03.0.011.2.01.045.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
1.03.1.03.0.011.2.01.045.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
1.03.1.03.0.011.2.01.06	FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00
1.03.1.03.0.011.2.01.065.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00
1.03.1.03.0.011.2.01.065.1.02.01.	Belanja Barang	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00
1.03.1.03.0.011.2.01.065.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00
1.03.1.03.0.011.2.02.01	PENGELOLAAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
1.03.1.03.0.011.2.02.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
1.03.1.03.0.011.2.02.015.1.02.02.	Belanja Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
1.03.1.03.0.011.2.02.015.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
1.03.1.03.0.011.2.03.03	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI	41.820.000,00	31.320.000,00	74,89
1.03.1.03.0.011.2.03.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.820.000,00	31.320.000,00	74,89
1.03.1.03.0.011.2.03.035.1.02.02.	Belanja Jasa	41.820.000,00	31.320.000,00	74,89
1.03.1.03.0.011.2.03.035.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	41.820.000,00	31.320.000,00	74,89
1.03.1.03.0.011.2.04.02	BIMBINGAN TEKNIS TENTANG TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	186.230.000,00	184.240.000,00	98,93
1.03.1.03.0.011.2.04.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	186.230.000,00	184.240.000,00	98,93

1.03.1.03.0.011.2.04.025.1.02.01.	Belanja Barang	36.000.000,00	34.800.000,00	96,66
1.03.1.03.0.011.2.04.025.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	36.000.000,00	34.800.000,00	96,66
1.03.1.03.0.011.2.04.025.1.02.02.	Belanja Jasa	39.880.000,00	39.380.000,00	98,74
1.03.1.03.0.011.2.04.025.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	39.880.000,00	39.380.000,00	98,74
1.03.1.03.0.011.2.04.025.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	110.350.000,00	110.060.000,00	99,73
1.03.1.03.0.011.2.04.025.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.350.000,00	110.060.000,00	99,73
1.03.1.03.0.011.2.04.03	PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	313.210.000,00	306.049.000,00	97,71
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	255.320.000,00	248.239.000,00	97,22
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.01.	Belanja Barang	52.095.000,00	51.255.000,00	98,38
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	52.095.000,00	51.255.000,00	98,38
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.02.	Belanja Jasa	50.000.000,00	45.134.000,00	90,26
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	45.134.000,00	90,26
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	3.710.000,00	74,20
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	3.710.000,00	74,20
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	148.225.000,00	148.140.000,00	99,94
1.03.1.03.0.011.2.04.035.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	148.225.000,00	148.140.000,00	99,94
1.03.1.03.0.011.2.04.035.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.890.000,00	57.810.000,00	99,86
1.03.1.03.0.011.2.04.035.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	57.890.000,00	57.810.000,00	99,86
1.03.1.03.0.011.2.04.035.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	57.890.000,00	57.810.000,00	99,86
1.03.1.03.0.012.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	664.096.000,00	603.031.000,00	90,80
1.03.1.03.0.012.2.01.01	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA	159.246.000,00	159.246.000,00	100,00
1.03.1.03.0.012.2.01.015.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.246.000,00	159.246.000,00	100,00
1.03.1.03.0.012.2.01.015.1.02.02.	Belanja Jasa	159.246.000,00	159.246.000,00	100,00
1.03.1.03.0.012.2.01.015.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	159.246.000,00	159.246.000,00	100,00
1.03.1.03.0.012.2.01.02	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RRTR KABUPATEN/KOTA	500.000,00	-	-
1.03.1.03.0.012.2.01.025.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	-	-
1.03.1.03.0.012.2.01.025.1.02.02.	Belanja Jasa	500.000,00	-	-
1.03.1.03.0.012.2.01.025.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000,00	-	-

1.03.1.03.0.012.2.01.03	PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	2.100.000,00	-	-
1.03.1.03.0.012.2.01.035.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	-	-
1.03.1.03.0.012.2.01.035.1.02.02.	Belanja Jasa	2.100.000,00	-	-
1.03.1.03.0.012.2.01.035.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.100.000,00	-	-
1.03.1.03.0.012.2.02.01	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA	123.550.000,00	81.710.000,00	66,13
1.03.1.03.0.012.2.02.015.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.550.000,00	81.710.000,00	66,13
1.03.1.03.0.012.2.02.015.1.02.02.	Belanja Jasa	77.250.000,00	35.700.000,00	46,21
1.03.1.03.0.012.2.02.015.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	77.250.000,00	35.700.000,00	46,21
1.03.1.03.0.012.2.02.015.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	46.300.000,00	46.010.000,00	99,37
1.03.1.03.0.012.2.02.015.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.300.000,00	46.010.000,00	99,37
1.03.1.03.0.012.2.02.02	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA	18.850.000,00	14.870.000,00	78,88
1.03.1.03.0.012.2.02.025.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000,00	14.870.000,00	78,88
1.03.1.03.0.012.2.02.025.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	18.850.000,00	14.870.000,00	78,88
1.03.1.03.0.012.2.02.025.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.850.000,00	14.870.000,00	78,88
1.03.1.03.0.012.2.04.04	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	359.850.000,00	347.205.000,00	96,48
1.03.1.03.0.012.2.04.045.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.850.000,00	347.205.000,00	96,48
1.03.1.03.0.012.2.04.045.1.02.02.	Belanja Jasa	146.600.000,00	136.600.000,00	93,17
1.03.1.03.0.012.2.04.045.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	146.600.000,00	136.600.000,00	93,17
1.03.1.03.0.012.2.04.045.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	213.250.000,00	210.605.000,00	98,75
1.03.1.03.0.012.2.04.045.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	213.250.000,00	210.605.000,00	98,75

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Tidak Terdapat kendala yang berarti dalam penyerapan anggaran belanja, pada umumnya semua program dan kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 telah terlaksana sesuai yang di rencanakan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Dan entitas akuntansi adalah SKPD yang wajib menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis ekrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/ asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat

perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1) Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

(1) Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

(2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

2) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

3) **Piutang Pajak**

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

4) **Piutang Lain-Lain**

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/ BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitur. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

5) **Persediaan**

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (duabelas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

6) **Investasi Non Permanen**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

7) Investasi Permanen

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

8) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai

bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

9) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini

antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

10) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan

bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

11) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

12) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

13) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

14) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitor.

15) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

16) Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

2) Utang/Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban.

Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4) Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

5) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

6) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

7) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

8) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

9) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

10) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Bupati KH Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kapuas Hulu yang berpedoman sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berbasis akrual diterapkan secara murni, namun masih menyusun Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas sebagai indikator untuk mendapatkan informasi pelaksanaan APBD.

B A B IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih atau ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Target dan realisasi pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ Turun	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69	209.937.000,00	(98.582.500,00)	(46,96)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69	209.937.000,00	(98.582.500,00)	(46,96)
4.1.02	Retribusi Daerah	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69	209.937.000,00	(98.582.500,00)	(46,96)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	250.000.000,00	32.865.000,00	13,15	209.935.000,00	(177.070.000,00)	(84,35)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	32.865.000,00	13,15	209.935.000,00	(177.070.000,00)	(84,35)
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	250.000.000,00	32.865.000,00	13,15	-	32.865.000,00	100,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	125.000.000,00	78.489.500,00	62,79	2.000,00	78.487.500,00	99,997
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	2.000,00	(2.000,00)	(100,00)
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	2.000,00	(2.000,00)	(100,00)
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	125.000.000,00	78.489.500,00	62,79	-	78.489.500,00	100,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	125.000.000,00	78.489.500,00	62,79	-	78.489.500,00	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan penurunan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, terjadi penurunan 46,96% karena terjadi peralihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung dan selama transisi/ konversi perizinan tersebut Pemerintah Daerah memberikan layanan PBG

tanpa disertai pemungutan retribusi atau gratis. Hal ini dilakukan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi PBG dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

4.1.1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- ✓ Belanja Operasi terdiri dari:
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Hibah
- ✓ Belanja Modal terdiri dari:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Bangunan dan Gedung
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana daftar rincian di bawah ini :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ Turun	%
5.	BELANJA DAERAH	231.504.119.703,00	229.148.125.425,40	98,98	246.507.132.299,87	(17.359.006.874,47)	(7,04)
5.1.	BELANJA OPERASI	59.876.719.051,00	58.019.278.466,32	96,90	83.432.342.200,13	(25.413.063.733,81)	(30,46)
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.825.195.951,00	7.637.634.834,00	86,54	7.759.509.290,00	(121.874.456,00)	(1,57)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.483.579.130,00	30.870.291.988,50	98,05	41.872.081.986,00	(11.001.789.997,50)	(26,27)
5.1.05.	Belanja Hibah	19.567.943.970,00	19.511.351.643,82	99,71	33.800.750.924,13	(14.289.399.280,31)	(42,28)
5.2.	BELANJA MODAL	171.627.400.652,00	171.128.846.959,08	99,71	163.074.790.099,74	8.054.056.859,34	4,94
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.290.000,00	222.855.000,00	97,62	839.714.000,00	(616.859.000,00)	(73,46)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.698.336.750,00	52.547.178.100,08	99,71	50.980.150.697,00	1.567.027.403,08	3,07
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.700.773.902,00	118.358.813.859,00	99,71	111.254.925.402,74	7.103.888.456,26	6,39

Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi belanja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp. 17.359.006.874,47) atau (7,04) yang terdiri dari belanja barang operasional yang mengalami penurunan sebesar (Rp. 25.413.063.733,81) atau (30,46%), sedangkan belanja modal mengalami kenaikan sebesar (Rp.8.054.056.859,34) atau (4,94

Penjelasan masing-masing jenis Belanja adalah sebagai berikut:

✓ **Belanja Operasional**

• **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Jumlah anggaran Belanja pegawai pada APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.8.825.195.951,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.637.634.834,00 atau 86,54% mengalami penurunan sebesar (Rp. 121.874.456,00) atau (1,57%) jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ Turun	%
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.825.195.951,00	7.637.634.834,00	86,54	7.759.509.290,00	(121.874.456,00)	(1,57)
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.517.249.066,00	4.480.492.018,00	81,21	4.698.836.378,00	(218.344.360,00)	(4,65)
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.037.932.565,00	3.272.431.980,00	81,04	3.443.034.560,00	(170.602.580,00)	(4,96)
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.226.730.715,00	3.178.781.180,00	98,51	3.401.503.560,00	(222.722.380,00)	(6,55)
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	811.201.850,00	93.650.800,00	11,54	41.531.000,00	52.119.800,00	125,50
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	355.702.276,00	352.960.196,00	99,23	377.740.519,00	(24.780.323,00)	(6,56)
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	106.899.567,00	6.360.264,00	5,95	2.491.860,00	3.868.404,00	155,24
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.898.250,00	160.305.000,00	99,63	178.470.000,00	(18.165.000,00)	(10,18)
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	130.454.250,00	129.990.000,00	99,64	111.715.000,00	18.275.000,00	16,36
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.617.250,00	89.370.000,00	98,62	100.445.000,00	(11.075.000,00)	(11,03)
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	50.678.500,00	5.900.000,00	11,64	2.590.000,00	3.310.000,00	127,80
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	215.782.632,00	214.580.460,00	99,44	231.961.260,00	(17.380.800,00)	(7,49)
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	75.331.284,00	5.069.400,00	6,73	2.027.760,00	3.041.640,00	150,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	501.870,00	499.928,00	99,61	557.073,00	(57.145,00)	(10,26)
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.440,00	52.116,00	89,18	51.885,00	231,00	0,45
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	25.145,00	848,00	3,37	380,00	468,00	123,16
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	215.193.246,00	211.994.878,00	98,51	217.593.204,00	(5.598.326,00)	(2,57)
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	43.138.378,00	4.183.722,00	9,70	1.718.154,00	2.465.568,00	143,50
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.590.385,00	6.501.995,00	98,66	7.024.507,00	(522.512,00)	(7,44)
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.918.510,00	196.292,00	10,23	85.440,00	110.852,00	129,74
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.771.246,00	19.506.083,00	98,66	21.073.468,00	(1.567.385,00)	(7,44)
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.755.272,00	588.856,00	10,23	256.308,00	332.548,00	129,75
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.143.866.885,00	2.109.342.816,00	98,39	2.007.032.912,00	102.309.904,00	5,10
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	122.000.000,00	13.000.000,00	10,66	3.000.000,00	10.000.000,00	333,33
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaba	993.120.000,00	985.840.000,00	99,27	1.009.840.000,00	(24.000.000,00)	(2,38)

	n Pengelola Keuangan						
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.960.000,00	48.960.000,00	100,00	40.800.000,00	8.160.000,00	20,00

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Anggaran Belanja barang dan jasa pada APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 31.483.579.130,00 terealisasi sebesar Rp. 30.870.291.988,50 atau 98,05% realisasi tahun 2022 sebesar Rp.

41.872.081.986,00. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan

sebesar Rp. (11.001.789.997,50) atau (26,27)% sebagaimana tabel di bawah ini:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ Turun	%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.483.579.130,00	30.870.291.988,50	98,05	41.872.081.986,00	(11.001.789.997,50)	(26,27)
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.368.223.270,00	2.250.936.029,00	95,05	2.522.414.972,00	(271.478.943,00)	(10,76)
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.368.223.270,00	2.250.936.029,00	95,05	2.522.414.972,00	(271.478.943,00)	(10,76)
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	33.245.000,00	(33.245.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	496.553.970,00	487.113.780,00	98,10	532.694.138,00	(45.580.358,00)	(8,56)
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	2.600.000,00	4.600.000,00	176,92
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.340.800,00	15.335.000,00	99,96	2.175.000,00	13.160.000,00	605,06
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	167.420.000,00	155.531.200,00	92,90	115.060.000,00	40.471.200,00	35,17
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	260.105.000,00	249.524.799,00	95,93	187.617.000,00	61.907.799,00	33,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	342.842.900,00	341.272.900,00	99,54	679.262.654,00	(337.989.754,00)	(49,76)
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	32.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,25)

5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	195.000.000,00	179.400.000,00	92,00	181.350.000,00	(1.950.000,00)	(1,08)
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	52.605.000,00	52.605.000,00	100,00	56.640.000,00	(4.035.000,00)	(7,12)
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.195.600,00	62.280.600,00	98,55	64.707.100,00	(2.426.500,00)	(3,75)
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	374.000.000,00	334.818.750,00	89,52	462.824.080,00	(128.005.330,00)	(27,66)
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	89.800.000,00	89.800.000,00	100,00	69.160.000,00	20.640.000,00	29,84
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	72.960.000,00	70.920.000,00	97,20	65.780.000,00	5.140.000,00	7,81
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	-	75.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	37.300.000,00	49.700.000,00	133,24
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	39.200.000,00	13.134.000,00	33,51	-	13.134.000,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.575.963.860,00	6.349.399.378,00	96,55	7.288.386.620,00	(938.987.242,00)	(12,88)
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.269.450.000,00	5.107.911.918,00	96,93	5.392.892.329,00	(284.980.411,00)	(5,28)
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	59.950.000,00	36.550.000,00	60,97	66.150.000,00	(29.600.000,00)	(44,75)
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	501.450.000,00	432.200.000,00	86,19	378.320.000,00	53.880.000,00	14,24
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	102.400.000,00	90.400.000,00	88,28	66.600.000,00	23.800.000,00	35,74
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	12.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	5.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	155.500.000,00	147.450.000,00	94,82	176.250.000,00	(28.800.000,00)	(16,34)
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.101.900.000,00	3.068.100.000,00	98,91	3.100.500.000,00	(32.400.000,00)	(1,04)
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	884.178.000,00	(344.178.000,00)	(38,93)
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	176.400.000,00	176.400.000,00	100,00	176.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	177.600.000,00	177.600.000,00	100,00	177.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.000.000,00	8.000.000,00	88,89	8.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	450.000,00	450.000,00	100,00	-	450.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	50.000.000,00	45.134.000,00	90,27	49.761.500,00	(4.627.500,00)	(9,30)
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.500.000,00	938.000,00	62,53	2.901.300,00	(1.963.300,00)	(67,67)
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	180.000.000,00	175.714.826,00	97,62	168.993.794,00	6.721.032,00	3,98
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	64.200.000,00	63.770.000,00	99,33	42.840.000,00	20.930.000,00	48,86
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	95.500.000,00	95.431.092,00	99,93	49.933.335,00	45.497.757,00	91,12
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	36.000.000,00	32.174.000,00	89,37	31.864.400,00	309.600,00	0,97
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	140.996.000,00	136.884.000,00	97,08	138.180.000,00	(1.296.000,00)	(0,94)
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.294.160,00	6.736.560,00	81,22	6.102.720,00	633.840,00	10,39
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.367.700,00	9.258.300,00	89,30	7.628.400,00	1.629.900,00	21,37

5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-	7.500.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0033.	Belanja Sewa Bangunan Parkir	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	-	-	-	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	-	-	-	324.645.300,00	(324.645.300,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	800.310.000,00	800.310.000,00	100,00	-	800.310.000,00	100,00
5.1.02.02.08.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.550.000,00	-	-	-	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	90.248.000,00	89.198.000,00	98,84	299.233.245,00	(210.035.245,00)	(70,19)
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	-	-	-	39.960.000,00	(39.960.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.08.0027.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	70.048.000,00	70.048.000,00	100,00	-	70.048.000,00	100,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	-	-	-	696.854.000,00	(696.854.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	170.000.000,00	114.352.600,00	67,27	363.190.626,00	(248.838.026,00)	(68,51)
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.640.010.000,00	2.613.474.367,50	98,99	1.294.881.210,00	1.318.593.157,50	101,83
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	450.310.000,00	426.760.450,00	94,77	627.121.550,00	(200.361.100,00)	(31,95)
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	170.800.000,00	170.535.000,00	99,84	346.539.600,00	(176.004.600,00)	(50,79)
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	111.330.000,00	89.375.450,00	80,28	102.982.450,00	(13.607.000,00)	(13,21)
5.1.02.03.02.0050.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	20.240.000,00	20.200.000,00	99,80	49.480.000,00	(29.280.000,00)	(59,18)
5.1.02.03.02.0068.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.000.000,00	3.710.000,00	74,20	-	3.710.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0101.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop	-	-	-	1.450.000,00	(1.450.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	10.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.800.000,00	48.800.000,00	100,00	-	48.800.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	49.640.000,00	49.640.000,00	100,00	126.669.500,00	(77.029.500,00)	(60,81)

5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00	-	34.500.000,00	100,00
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.233.000.000,00	1.230.074.392,50	99,76	-	1.230.074.392,50	100,00
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-	100.000.000,00	100,00
5.1.02.03.04.0091.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	856.700.000,00	856.639.525,00	99,99	667.759.660,00	188.879.865,00	28,29
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	7.575.465.550,00	7.332.565.764,00	96,79	8.990.067.184,00	(1.657.501.420,00)	(18,44)
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.575.465.550,00	7.332.565.764,00	96,79	8.990.067.184,00	(1.657.501.420,00)	(18,44)
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.133.792.000,00	2.006.505.764,00	94,03	1.578.779.224,00	427.726.540,00	27,09
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	5.441.673.550,00	5.326.060.000,00	97,88	7.411.287.960,00	(2.085.227.960,00)	(28,14)
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.323.916.450,00	12.323.916.450,00	100,00	21.776.332.000,00	(9.452.415.550,00)	(43,41)
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.323.916.450,00	12.323.916.450,00	100,00	21.762.901.000,00	(9.438.984.550,00)	(43,37)
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	12.323.916.450,00	12.323.916.450,00	100,00	21.762.901.000,00	(9.438.984.550,00)	(43,37)
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	13.431.000,00	(13.431.000,00)	(100,00)
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	13.431.000,00	(13.431.000,00)	(100,00)

• Belanja Hibah

Belanja hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dan Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2023 pada APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 19.567.943.970,00 terealisasi sebesar Rp. 19.511.351.643,82 atau 99,71% realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 33.800.750.924,13. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar (Rp. 14.289.399.280,31) atau (42,28)% sebagaimana tabel di bawah ini:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ Turun	%
5.1.05.	Belanja Hibah	19.567.943.970,00	19.511.351.643,82	99,71	33.800.750.924,13	(14.289.399.280,31)	(42,28)

5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.303.532.754,00	7.276.883.677,82	99,64	9.692.047.914,45	(2.415.164.236,63)	(24,92)
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.303.532.754,00	7.276.883.677,82	99,64	9.692.047.914,45	(2.415.164.236,63)	(24,92)
5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.303.532.754,00	7.276.883.677,82	99,64	9.692.047.914,45	(2.415.164.236,63)	(24,92)
5.1.05.04.	Belanja Hibah kepada BUMD	-	-	-	179.840.000,00	(179.840.000,00)	(100,00)
5.1.05.04.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	-	-	-	179.840.000,00	(179.840.000,00)	(100,00)
5.1.05.04.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	-	-	-	179.840.000,00	(179.840.000,00)	(100,00)
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.264.411.216,00	12.234.467.966,00	99,76	23.928.863.009,68	(11.694.395.043,68)	(48,87)
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	235.000.000,00	234.805.250,00	99,92	-	234.805.250,00	100,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	235.000.000,00	234.805.250,00	99,92	-	234.805.250,00	100,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.029.411.216,00	11.999.662.716,00	99,75	20.704.824.009,68	(8.705.161.293,68)	(42,04)
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.029.411.216,00	11.999.662.716,00	99,75	20.704.824.009,68	(8.705.161.293,68)	(42,04)
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	3.224.039.000,00	(3.224.039.000,00)	(100,00)
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	3.224.039.000,00	(3.224.039.000,00)	(100,00)

✓ **Belanja Modal.**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Anggaran Belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 171.627.400.652,00 terealisasi sebesar Rp. 171.128.846.959,08 atau 99,71% realisasi tahun 2022 sebesar Rp.163.074.790.099,74. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Belanja modal tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.054.056.859,34 atau 4,94% dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Naik/ Turun	%
5.2.	BELANJA MODAL	171.627.400.652,00	171.128.846.959,08	99,71	163.074.790.099,74	8.054.056.859,34	4,94
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.290.000,00	222.855.000,00	97,62	839.714.000,00	(616.859.000,00)	(73,46)
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	502.300.000,00	(502.300.000,00)	(100,00)
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	502.300.000,00	(502.300.000,00)	(100,00)
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	502.300.000,00	(502.300.000,00)	(100,00)
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	244.908.000,00	(244.908.000,00)	(100,00)
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	244.908.000,00	(244.908.000,00)	(100,00)
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	244.908.000,00	(244.908.000,00)	(100,00)
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	57.890.000,00	57.810.000,00	99,86	-	57.810.000,00	100,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	57.890.000,00	57.810.000,00	99,86	-	57.810.000,00	100,00
5.2.02.08.01.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	57.890.000,00	57.810.000,00	99,86	-	57.810.000,00	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	170.400.000,00	165.045.000,00	96,86	92.506.000,00	72.539.000,00	78,42
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	110.400.000,00	109.200.000,00	98,91	58.365.000,00	50.835.000,00	87,10
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	75.000.000,00	73.875.000,00	98,50	58.365.000,00	15.510.000,00	26,57
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	35.400.000,00	35.325.000,00	99,79	-	35.325.000,00	100,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	60.000.000,00	55.845.000,00	93,08	34.141.000,00	21.704.000,00	63,57
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000,00	55.845.000,00	93,08	34.141.000,00	21.704.000,00	63,57
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.698.336.750,00	52.547.178.100,08	99,71	50.980.150.697,00	1.567.027.403,08	3,07
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	52.518.336.750,00	52.367.328.100,08	99,71	50.980.150.697,00	1.387.177.403,08	2,72
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.518.336.750,00	52.367.328.100,08	99,71	50.980.150.697,00	1.387.177.403,08	2,72
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	52.518.336.750,00	52.367.328.100,08	99,71	50.515.040.697,00	1.852.287.403,08	3,67
5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	340.760.000,00	(340.760.000,00)	(100,00)
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-	124.350.000,00	(124.350.000,00)	(100,00)
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	180.000.000,00	179.850.000,00	99,92	-	179.850.000,00	100,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	180.000.000,00	179.850.000,00	99,92	-	179.850.000,00	100,00
5.2.03.04.01.0001.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	180.000.000,00	179.850.000,00	99,92	-	179.850.000,00	100,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.700.773.902,00	118.358.813.859,00	99,71	111.254.925.402,74	7.103.888.456,26	6,39
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	116.897.115.302,00	116.555.750.249,00	99,71	106.657.836.976,00	9.897.913.273,00	9,28
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	114.221.324.316,00	113.883.649.263,00	99,70	95.985.687.294,00	17.897.961.969,00	18,65
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	112.003.263.216,00	111.665.615.390,00	99,70	95.316.003.594,00	16.349.611.796,00	17,15
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	2.218.061.100,00	2.218.033.873,00	100,00	-	2.218.033.873,00	100,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	-	-	-	669.683.700,00	(669.683.700,00)	(100,00)
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	2.675.790.986,00	2.672.100.986,00	99,86	10.672.149.682,00	(8.000.048.696,00)	(74,96)
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	975.085.304,00	975.085.304,00	100,00	8.155.742.682,00	(7.180.657.378,00)	(88,04)
5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.700.705.682,00	1.697.015.682,00	99,78	2.516.407.000,00	(819.391.318,00)	(32,56)
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	783.722.600,00	783.127.610,00	99,92	2.819.690.336,74	(2.036.562.726,74)	(72,23)
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	262.252.360,00	262.118.210,00	99,95	2.684.737.336,74	(2.422.619.126,74)	(90,24)

5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	262.252.360,00	262.118.210,00	99,95	2.684.737.336,74	(2.422.619.126,74)	(90,24)
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	521.470.240,00	521.009.400,00	99,91	134.953.000,00	386.056.400,00	286,07
5.2.04.02.04.0001.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	521.470.240,00	521.009.400,00	99,91	134.953.000,00	386.056.400,00	286,07
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	1.019.936.000,00	1.019.936.000,00	100,00	823.689.290,00	196.246.710,00	23,83
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.019.936.000,00	1.019.936.000,00	100,00	729.575.390,00	290.360.610,00	39,80
5.2.04.03.02.0004.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.019.936.000,00	1.019.936.000,00	100,00	729.575.390,00	290.360.610,00	39,80
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	94.113.900,00	(94.113.900,00)	(100,00)
5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	-	-	94.113.900,00	(94.113.900,00)	(100,00)
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	953.708.800,00	(953.708.800,00)	(100,00)
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	-	953.708.800,00	(953.708.800,00)	(100,00)
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	-	953.708.800,00	(953.708.800,00)	(100,00)

4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.2.1. Aset

Jumlah Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.681.991.173.024,50 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 17.608.347.176,32 dan Tahun 2022 sebesar Rp. 41.669.638.733,82

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah kas di bendahara pengeluaran per Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00

- Kas Lainnya – PFK

Kas Lainnya – PFK pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00

- Piutang Lainnya

Piutang lainnya pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00

- Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00

- Persediaan

Persediaan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 41.665.912.303,82

yang terdiri dari :

- Stock opname Persediaan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.122.043,25
- Belanja hibah sebesar Rp. 17.608.347.176,32 yang belum diserahkan karena masih dalam tahap pemeliharaan sehingga dicatat dalam persediaan.

➤ **Aset Tetap.**

Jumlah Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.569.060.335.466,19 dan Tahun 2022 sebesar Rp. 3.397.863.339.163,53 dengan mutasi aset sebelum penyusutan sebagai berikut :

No. Urut		Nama Bidang Barang	Saldo Tahun 2022	LRA 2023	MUTASI 2023		Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	
1		Tanah	Rp 75.510.986.143,00	Rp -	Rp 51.067.421,00	Rp -	Rp 75.562.053.564,00
	1.3.1.01.	Tanah	Rp 75.510.986.143,00	Rp -	Rp 51.067.421,00	Rp -	Rp 75.562.053.564,00
2		Peralatan dan Mesin	Rp 20.079.039.876,12	Rp 222.855.000,00	Rp 45.017.731,47	Rp 199.899.656,42	Rp 20.147.012.951,17
	1.3.2.01	Alat-alat Besar	Rp 2.201.233.297,26	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.201.233.297,26
	1.3.2.02	Alat Angkutan	Rp 7.046.240.369,10	Rp -	Rp -	Rp 36.718.333,33	Rp 7.009.522.035,77
	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.463.044.287,03	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.463.044.287,03
	1.3.2.04	Alat Pertanian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.05	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	Rp 2.239.213.179,66	Rp -	Rp -	Rp 64.832.261,35	Rp 2.174.380.918,31
	1.3.2.06	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1.117.409.926,14	Rp -	Rp -	Rp 15.628.000,00	Rp 1.101.781.926,14
	1.3.2.07	Alat Kedokteran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.08	Alat Laboratorium	Rp 1.348.752.605,01	Rp 57.810.000,00	Rp 16.539,45	Rp 45.553.925,37	Rp 1.361.025.219,09
	1.3.2.09	Alat Persenjataan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	1.3.2.10	Komputer	Rp 4.564.349.749,01	Rp 165.045.000,00	Rp 45.001.192,02	Rp 37.167.136,37	Rp 4.737.228.804,66
	1.3.2.11	Alat Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.12	Alat Pengeboran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.16	Alat Praga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.2.18	Rambu - Rambu	Rp 98.796.462,91	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 98.796.462,91
	1.3.2.19	Peralatan Olah raga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3		Gedung dan Bangunan	Rp 82.631.495.608,76	Rp 52.697.073.110,00	Rp 15.033.758,98	Rp 60.258.399.352,48	Rp 75.085.203.125,27
	1.3.3.01	Bangunan Gedung	Rp 76.119.213.262,52	Rp 52.517.223.110,00	Rp 14.982.303,86	Rp 60.258.399.352,48	Rp 68.393.019.323,90
	1.3.3.02	Monumen	Rp 2.375.815.655,50	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.375.815.655,50
	1.3.3.03	Bangunan Menara	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol /Pasti	Rp 4.136.466.690,74	Rp 179.850.000,00	Rp 51.455,12	Rp -	Rp 4.316.368.145,86
4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3.095.960.390.564,97	Rp 118.358.813.859,00	Rp 53.720.947.085,45	Rp 3.813.284.902,04	Rp 3.264.226.866.607,39
	1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	Rp 2.822.404.721.905,69	Rp 116.555.750.249,00	Rp 44.214.196.027,09	Rp 1.237.879.933,31	Rp 2.981.936.788.248,47
	1.3.4.02	Bangunan Air	Rp 141.781.106.380,69	Rp -	Rp 9.506.235.201,47	Rp 99.728.524,19	Rp 151.187.613.057,97
	1.3.4.03	Instalasi	Rp 34.111.243.510,80	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34.111.243.510,80
	1.3.4.04	Jaringan	Rp 97.663.318.767,79	Rp 1.803.063.610,00	Rp 515.856,89	Rp 2.475.676.444,53	Rp 96.991.221.790,15
5		Aset Tetap Lainnya	Rp 1.375.695.514,68	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.375.695.514,68
	1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	Rp 1.260.732.014,68	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.260.732.014,68
	1.3.5.02	Barang Bercorak Kebudayaan Kesenian /Kebudayaan dan Olahraga	Rp 49.916.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 49.916.000,00
	1.3.5.03	Hewan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.5.04	Biota Perairan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.5.05	Tanaman	Rp 65.047.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 65.047.500,00
	1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

	1.3.5.07	Aset tetap Dalam Renovasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 122.305.731.456,01	Rp -	Rp 53.869.813.871,36	Rp 43.512.041.623,68	Rp 132.663.503.703,69
	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 122.305.731.456,01	Rp -	Rp 53.869.813.871,36	Rp 43.512.041.623,68	Rp 132.663.503.703,69
7		Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3.5.08.	Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH TOTAL ASET TETAP			Rp 3.397.863.339.163,54	Rp 171.278.741.969,00	Rp 107.701.879.868,27	Rp 107.783.625.534,62	Rp 3.569.060.335.466,19
8		Aset Lain-lain	Rp 155.959.897.989,86	Rp -	Rp -	Rp 58.683.982,00	Rp 155.901.214.007,86
9		Nilai Dibawah Minimum	Rp 20.634.991.694,29	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.634.991.694,29

- **Aset Tetap Tanah**

Saldo aset tetap tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 75.562.053.564,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Tanah per 31 Desember 2022	75.510.986.143,00
Hibah dari Kementerian Pajak	51.067.421,00
Saldo Tanah per 31 Desember 2023	75.562.053.564,00

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Alat-alat Berat**

Saldo aset tetap alat-alat berat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.201.233.297,26 tidak ada penambahan atau pengurangan pada tahun 2023.

Akumulasi penyusutan aset tetap alat berat adalah sebesar Rp. 2.044.131.763,23 dengan demikian nilai wajar (nilai buku) alat berat per 31 Desember 2023 setelah disusutkan adalah sebesar Rp. 157.101.534,03 serta Beban Penyusutan untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 65.798.224,93

“ L.

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ”

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Angkutan**

Saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.009.522.035,77 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Alat Angkutan per 31 Desember 2022	7.046.240.369,10
Penghapusan Dampak Kebakaran	8.235.000,00
Mutasi ke Sekretariat Daerah	28.483.333,33
Saldo Alat Angkutan per 31 Desember 2023	7.009.522.035,77

Akumulasi penyusutan aset tetap angkutan adalah sebesar Rp. 6.572.487.544,26 dengan demikian nilai wajar (nilai buku) alat angkutan per 31 Desember 2023 setelah disusutkan adalah sebesar Rp. 437.034.491,50 serta Beban Penyusutan untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 176.802.692,16

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur**

Saldo alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.463.044.287,03 tidak ada penambahan atau pengurangan pada tahun 2023.

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 1.434.064.690,67 sehingga saldo wajar (nilai buku) alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 28.979.596,36 serta Beban Penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 25.233.911,77

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Pertanian**

Saldo alat-alat pertanian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2022 Rp. 0,00 tidak ada penambahan atau pengurangan pada tahun 2023.

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga**

Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2023 adalah sebesar

Rp.2.174.380.918,31 dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022	2.239.213.179,66
Penghapusan Dampak Kebakaran	64.832.261,35
Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023	2.174.380.918,31

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 2.052.499.873,03 sehingga saldo nilai buku alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 121.881.045,30 serta beban penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 82.925.212,97

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Studio dan Komunikasi**

Saldo alat-alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.

1.101.781.926,14 dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2022	1.117.409.926,14
Penghapusan Dampak Kebakaran	15.628.000,00
Saldo Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2023	1.101.781.926,14

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 1.041.163.239,50 sehingga saldo nilai buku alat-alat studio dan komunikasi tangga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 60.618.686,64 serta beban penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 36.289.149,01

- **Aset Tetap Peralatan dan Alat Laboratorium**

Saldo aset tetap alat laboratorium per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.

Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2022	1.348.752.605,01
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	57.810.000,00
Atribusi	16.539,45
Penghapusan Dampak Kebakaran	45.553.925,37
Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2023	1.361.025.219,09

1.361.025.219,09 dengan penjelasan sebagai berikut :

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 1.234.475.079,12 sehingga saldo nilai buku alat laboratorium per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 126.550.139,97 serta Beban Penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 79.033.419,46

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Rambu - rambu**

Saldo Rambu - rambu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 98.796.462,91 tidak ada penambahan atau pengurangan pada tahun 2023.

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 79.037.170,33 sehingga saldo wajar (nilai buku) alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 19.759.292,58 serta Beban Penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 19.759.292,58

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Komputer**

Saldo alat-alat komputer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.737.228.804,66 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Alat Komputer per 31 Desember 2022	4.564.349.749,01
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	165.045.000,00
Atribusi	47.219,41
Mutasi Masuk dari Dinas Perhubungan	29.181.739,48

Mutasi Masuk dari Dinas Pertanian dan Pangan	15.772.233,13
Sub Jumlah	4.774.395.941,03
Mutasi keluar ke Dinas Komunikasi dan Informatika	12.991.249,49
Mutasi keluar ke Satuan Polisi Pamong Praja	12.087.943,44
Mutasi keluar ke Kecamatan Bika	12.087.943,44
Saldo Alat Komputer per 31 Desember 2023	4.737.228.804,66

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 4.130.391.844,09 sehingga saldo nilai buku alat komputer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 606.836.960,58 serta Beban Penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 295.681.387,44

- **Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat Keamanan**

Saldo alat-alat komputer per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022 Rp. 0,00 tidak ada penambahan atau pengurangan pada tahun 2023.

- **Aset Tetap Gedung dan Bangunan-Kantor/Rumah Dinas/Rumah Jabatan/Mess/Sarana Olah Raga/ Fasilitas Umum**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 68.393.019.323,90 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2022	76.119.213.262,52
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	52.517.223.110,00
Atribusi	14.982.303,86
Sub Jumlah	128.651.418.676,38
Mutasi keluar ke Sekretariat Daerah	7.453.837.376,41
Mutasi keluar ke Kecamatan Bika	172.840.555,05
Mutasi keluar ke Kecamat Putussibau Utara	99.516.007,16
Reklas keluar ke KDP	52.532.205.413,86
Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2023	68.393.019.323,90

Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 21.701.937.112,66 sehingga saldo nilai buku aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 46.691.082.211,25 serta beban penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 1.573.239.637,56

- **Aset Tetap Gedung dan Bangunan –Monumen dan Tugu**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.692.183.801.36 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Monumen dan Tugu per 31 Desember 2022	6.512.282.346,24
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	179.850.000,00
Atribusi	51.455,12
Saldo Monumen dan Tugu per 31 Desember 2023	6.692.183.801,36

Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.315.002.757,02 sehingga saldo nilai buku aset tetap monumen dan tugu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.

5.377.181.044,35 serta beban penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 154.567.108,41

- **Aset Tetap Jalan dan Jembatan**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.981.936.788.248,47 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022	2.822.404.721.905,69
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	116.555.750.249,00
Atribusi	33.346.625,27
Mutasi masuk dari Kecamatan Bika	1.170.352.255,90
Reklas masuk dari KDP	43.010.497.145,92
Sub Jumlah	2.983.174.668.181,78
Reklas keluar masuk ke KDP	1.237.879.933,31
Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023	2.981.936.788.248,47

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 1.813.653.134.786,44 sehingga saldo nilai buku aset tetap jalan dan jembatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.168.283.653.462,03 serta beban penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 155.455.806.351,49

- **Aset Tetap – Bangunan Air (Irigasi) dan Jaringan air**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 141.781.106.380,69 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Bangunan Air (Irigasi) dan Jaringan Air per 31 Desember 2022	141.781.106.380,69
Hibah masuk Pembangunan Broncatering	7.872.194.832,00

Reklas masuk dari Jaringan	1.634.040.369,47
Sub Jumlah	151.287.341.582,17
Reklas keluar masuk ke KDP	99.728.524,19
Saldo Bangunan Air (Irigasi) dan Jaringan Air per 31 Desember 2023	151.187.613.057,98

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 30.854.737.237,07 sehingga saldo nilai buku aset tetap bangunan air (irigasi) dan jaringan air per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 120.332.875.820,91 serta beban penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 2.917.270.495,74

- **Aset Tetap Instalasi**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 34.111.243.510,80 tidak ada penambahan atau pengurangan pada tahun 2023.

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 18.782.440.130,44 sehingga saldo nilai buku aset tetap Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 15.328.803.380,36 serta beban penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 2.403.262.789,44

- **Aset Tetap Jaringan**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. Rp96.991.221.790,15 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Jaringan per 31 Desember 2022	97.663.318.767,79
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	1.803.063.610,00
Atribusi	515.856,89
Sub Jumlah	99.466.898.234,68

Penghapusan Dampak Kebakaran	831.876.054,00
Reklas keluar ke Bangunan Air	1.132.495.891,71
Koreksi keluar karena termasuk pemeliharaan	511.304.498,81
Saldo Jaringan per 31 Desember 2023	96.991.221.790,15

Akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp. 22.190.618.179,37 sehingga saldo nilai buku aset tetap Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 74.800.603.610,78 serta beban penyusutan di Tahun 2023 sebesar Rp. 2.403.262.789,44

- **Aset Tetap lainnya – Buku dan Kepustakaan**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.260.732.014,68

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2023

Tidak dilakukan penyusutan atas aset tetap lainnya karena didalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tidak lagi mengatur tentang penetapan masa manfaat aset tetap lainnya.

- **Aset Tetap Lainnya – Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 49.916.000,00

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2023

Tidak dilakukan penyusutan atas aset tetap lainnya karena didalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tidak lagi mengatur tentang penetapan masa manfaat aset tetap lainnya.

- **Aset Tetap Lainnya – Tanaman**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 65.047.500,00 Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2023.

Tidak dilakukan penyusutan atas aset tetap lainnya karena didalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tidak lagi mengatur tentang penetapan masa manfaat aset tetap lainnya.

- **Aset Tetap Dalam Renovasi**

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00

- **Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 132.663.503.703,69 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022	122.305.731.456,01
Reklas masuk KDP dari Aset Gedung	52.532.205.413,86
Reklas masuk KDP dari Aset Jalan dan Jembatan	1.237.879.933,31
Reklas masuk KDP dari Aset Jaringan dan Irigasi	99.728.524,19
Sub Jumlah	176.175.545.327,37
Reklas keluar KDP ke Aset Jalan dan Jembatan	43.010.497.145,92
Reklas keluar KDP ke Aset Jaringan	501.544.477,76
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023	132.663.503.703,69

- **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (1.927.086.121.407,19) dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2022	(1.766.200.364.523,85)
Akibat mutasi masuk	
Koreksi Penyusutan Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(65.798.224,93)
Koreksi Penyusutan Angkutan	(176.802.692,16)
Koreksi Penyusutan Alat bengkel dan ukur	(25.233.911,77)
Koreksi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(82.925.212,97)
Koreksi Penyusutan Alat Komputer	(310.508.529,86)
Koreksi Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi	(36.289.149,01)
Koreksi Penyusutan Alat Laboratorium	(79.033.419,46)
Koreksi Penyusutan Rambu-rambu	(19.759.292,58)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Bangunan Gedung	(1.573.239.637,56)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Tugu	(154.567.108,41)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan dan Jembatan	(156.626.158.607,39)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Bangunan Air	(3.232.158.289,02)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Instalasi dan Jaringan	(3.540.235.486,03)
Sub Jumlah	(165.922.709.561,16)
Akibat Penghapusan	
Koreksi Penyusutan Angkutan	(36.718.333,33)
Koreksi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(64.832.261,35)
Koreksi Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi	(15.628.000,00)
Koreksi Penyusutan Alat Laboratorium	(42.683.925,37)
Koreksi Penyusutan Alat Komputer	(26.774.136,78)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Bangunan Gedung	(2.497.127.129,96)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Jalan dan Jembatan	(1.908.131.765,39)
Koreksi Penyusutan Aset Tetap Instalasi dan Jaringan	(395.141.125,65)
Koreksi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian Lainnya	(49.916.000,00)
Sub Jumlah	(5.036.952.677,82)

➤ **ASET LAINNYA**

Aset lainnya pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 22.408.611.789,18 dan tahun 2022 sebesar Rp 22.408.611.789,18 merupakan aset yang sudah habis masa manfaatnya dan dalam kondisi tidak optimal terdiri dari :

• **Aset Lainnya – Aset Tak berwujud**

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00

• **Aset Lainnya – Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 155.901.214.007,86 dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	155.959.897.989,86
Reklas keluar ke Aset Lain-lain	58.683.982,00
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	155.901.214.007,86

• **Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

Saldo Akumulasi aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp. 133.551.286.200,68) dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo Akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2022	(133.551.286.200,68)
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(58.683.982,00)
Saldo Akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2023	(133.492.602.218,68)

➤ **Aset bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum (*Ekstrakomtable*)**

Total aset bernilai dibawah nilai kapitalisasi minimum per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 20.634.991.694,29 tidak ada penambahan atau pengurangan di tahun 2023

4.2.2 Kewajiban

Kewajiban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 357.372.738,93 terdiri dari :

➤ Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 347.669.468,01 terdiri dari :

● Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)

Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00

● Utang Belanja

- Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 357.372.738,93 dengan

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022	347.669.468,01
Utang Belanja Jasa Kantor tahun 2023	12.538.906,00
Utang Belanja TPP Desember 2023	157.616.000,00
Utang Jaminan Kesehatan	6.304.640,00
Utang Retensi tahun 2023	158.887.536,92
Sub Jumlah	683.016.550,93
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	(3.726.430,00)
Utang Belanja TPP Tahun 2022	(165.266.200,00)
Koreksi utang retensi yang sudah dibayar tahun 2023	(135.846.526,00)
Utang belanja Jasa Kantor tahun 2022	(20.804.656,00)
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023	357.372.738,93
rincian :	

➤ **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00

4.2.3 Ekuitas

Merupakan selisih kekayaan bersih dengan kewajiban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.681.633.800.285,57 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.695.407.943.550,89

4.2.4. Kewajiban dan Ekuitas

Saldo kewajiban dan ekuitas dana Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana yang tergambar dalam Neraca Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.681.991.173.024,50 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.695.755.613.018,90

4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan LO pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.034.616.753,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 111.354.500,00 dan Pendapatan Hibah - Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp. 7.923.262.253,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 209.937.000,00

4.3.2 Beban Operasional

Beban Operasional pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 desember 2023 sebesar Rp. 246.783.803.199,20 dan 2022 adalah sebesar Rp. 217.368.315.564,38 yang terdiri dari:

Rincian Beban Operasional- LO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 dan 2021

No.	Uraian	2023	2022
1	Beban Pegawai	7.587.329.274,00	7.883.975.490,00
2	Beban Persediaan	2.250.936.029,00	2.817.229.944,26
3	Beban Jasa	6.226.781.028,00	7.763.606.238,00
4	Beban Pemeliharaan	3.124.778.866,00	2.703.574.061,29
5	Beban Perjalanan Dinas	7.332.565.764,00	8.990.067.184,00
6	Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat		
7	Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.323.916.450,00	21.776.332.000,00
8	Beban Subsidi	-	-
9	Beban Penyisihan Piutang	-	-
10	Beban Penyusutan	164.422.642.370,00	155.120.681.549,20
11	Beban Amortisasi	-	-
12	Beban Hibah	43.400.500.818,00	9.904.731.234,00
13	Beban Bansos	-	-
14	Beban Beasiswa	-	-
15	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	114.352.600,00	363.190.626,00
16	Beban Ekstrakomptabel	-	44.927.237,62
17	Beban Lain-lain	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASI	246.783.803.199,00	217.368.315.564,38

Sumber: Laporan Operasional (Unaudited)

Penjelasan masing-masing beban sebagai berikut:

❖ **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap. Jumlah beban pegawai pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp 7.587.329.274,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 7.883.975.490,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai LO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu TA 2023

No.	Uraian	Realisasi	Atribusi	Beban
1	Beban Gaji Pokok PNS	3.178.781.180,00		3.178.781.180,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	93.650.800,00		93.650.800,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	352.960.196,00		352.960.196,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	6.360.264,00		6.360.264,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	160.305.000,00		160.305.000,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	129.990.000,00		129.990.000,00
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	89.370.000,00		89.370.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.900.000,00		5.900.000,00
9	Beban Tunjangan Beras PNS	214.580.460,00		214.580.460,00
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.069.400,00		5.069.400,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	499.928,00		499.928,00
12	Beban Pembulatan Gaji PNS	52.116,00		52.116,00
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	848,00		848,00
14	Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS	218.219.518,00		218.219.518,00
15	Beban iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.263.722,00		4.263.722,00
16	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.501.995,00		6.501.995,00
17	Beban iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	196.292,00		196.292,00
18	Beban iuran Jaminan Kematian PNS	19.506.083,00		19.506.083,00
19	Beban iuran Jaminan Kematian PPPK	588.856,00		588.856,00
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.099.692.616,00		2.099.692.616,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	15.000.000,00		15.000.000,00

22	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	985.840.000,00		985.840.000,00
23	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	48.960.000,00	(48.960.000,00)	0,00
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI LO	7.636.289.274,00	(48.960.000,00)	7.587.329.274,00

Sumber: Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu TA 2023 (Unaudited)

❖ **Beban Persediaan**

Jumlah beban persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.250.936.029,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 2.817.229.944,26 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan LO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu TA 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Persediaan 2023	Persediaan 2022	Beban LO
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				0,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	487.113.780,00			487.113.780,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	7.200.000,00			7.200.000,00
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	15.335.000,00			15.335.000,00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	155.531.200,00			155.531.200,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	249.524.799,00			249.524.799,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	341.272.900,00			341.272.900,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000.000,00			30.000.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	179.400.000,00			179.400.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	52.605.000,00			52.605.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	62.280.600,00			62.280.600,00
12	Beban Makanan dan Minuman Rapat	334.818.750,00			334.818.750,00
13	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	89.800.000,00			89.800.000,00
14	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	70.920.000,00			70.920.000,00
15	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.000.000,00			75.000.000,00

16	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	87.000.000,00			87.000.000,00
17	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	13.134.000,00			13.134.000,00
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN LO	2.250.936.029,00	0,00	0,00	2.250.936.029,00

Sumber: Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023 (Unaudited)

❖ **Beban Jasa**

Jumlah beban jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.226.781.028,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 7.763.606.238,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa LO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu TA 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Utang 2023	Utang 2022	Beban LO
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.550.000,00			36.550.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	432.200.000,00			432.200.000,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	90.400.000,00			90.400.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.600.000,00			12.600.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.000.000,00			5.000.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	147.450.000,00			147.450.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.068.100.000,00			3.068.100.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Ahli	540.000.000,00			540.000.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	176.400.000,00			176.400.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Keamanan	177.600.000,00			177.600.000,00
11	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	8.000.000,00			8.000.000,00
12	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	450.000,00			450.000,00
13	Beban Jasa Kalibrasi	45.134.000,00			45.134.000,00
14	Beban Tagihan Air	938.000,00	74.000,00	74.000,00	938.000,00
15	Beban Tagihan Listrik	175.714.826,00	12.464.906,00	16.286.556,00	171.893.176,00
16	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	63.770.000,00			63.770.000,00
17	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	95.431.092,00		4.444.100,00	90.986.992,00
18	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	32.174.000,00			32.174.000,00
19	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	136.884.000,00			136.884.000,00

20	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.736.560,00			6.736.560,00
21	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.258.300,00			9.258.300,00
22	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00			7.500.000,00
23	Beban Sewa Bangunan Parkir	7.200.000,00			7.200.000,00
24	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	89.198.000,00			89.198.000,00
25	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	800.310.000,00			800.310.000,00
26	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	70.048.000,00			70.048.000,00
	JUMLAH BEBAN JASA LO	6.235.046.778,00	12.538.906,00	20.804.656,00	6.226.781.028,00

Sumber: Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu 2023 (Unaudited)

❖ **Beban Pemeliharaan**

Jumlah beban pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.124.778.866,31 dan tahun 2022 sebesar Rp. 2.703.574.061,29. Beban pemeliharaan tahun 2023 digunakan untuk:

Rincian Beban Pemeliharaan LO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu TA 2023

No.	Uraian	Beban LO
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	170.535.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	89.375.450,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	20.200.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.710.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.800.000,00
7	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	49.640.000,00
8	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	34.500.000,00
9	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.230.074.392,50
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00
11	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	856.639.525,00
12	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Drainase	511.304.498,81
	JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN LO	3.124.778.866,31

Sumber: Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu 2023 (Unaudited)

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah beban perjalanan dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.332.565.764,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 8.990.067.184,00. Terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

❖ **Beban Uang/ Jasa Diserahkan pada Masyarakat**

Jumlah beban uang yang diserahkan pada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 12.323.916.450,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 21.776.332.000,00 terdiri dari Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).

❖ **Beban Penyisihan Piutang**

Jumlah beban penyisihan piutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 213.359,77.

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah beban penyusutan asset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 164.422.642.369,56 dan tahun 2022 sebesar Rp. 155.120.681.549,20. Terdiri dari:

Rincian Beban Penyusutan LO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu TA 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Alat-alat Besar	65.798.224,93
2	Beban Penyusutan Alat-alat angkutan	176.802.692,16
3	Beban Penyusutan Alat bengkel dan alat ukur	25.233.911,77
4	Beban Penyusutan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	82.925.212,97
5	Beban Penyusutan Alat-alat Komputer	295.681.387,44
6	Beban Penyusutan Alat-alat Studio dan Komunikasi	36.289.149,01
7	Beban Penyusutan Alat-alat Laboratorium	79.033.419,46

8	Beban Penyusutan Rambu-rambu	19.759.292,58
9	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan tempat kerja/mess/fasilitas umum	1.573.239.637,56
10	Beban Penyusutan Tugu dan Monumen	154.567.108,41
11	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	155.455.806.351,49
12	Beban Penyusutan Bangunan Air dan jaringan air	2.917.270.495,74
13	Beban Penyusutan Instalasi dan Jaringan	3.540.235.486,03
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN LO	164.422.642.369,56

Sumber: Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

❖ **Beban Amortisasi**

Jumlah beban amortisasi asset tak berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

❖ **Beban Hibah**

Jumlah beban hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp. 43.400.500.818,32 dan tahun 2022 sebesar Rp. 10.074.917.489,08 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Koreksi Beban Hibah LO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kapuas Hulu TA 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Koreksi Tambah 2023	Koreksi Kurang 2022	Beban LO
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.276.883.677,82	13.365.729.270,05	1.694.347.469,82	18.948.265.478,05
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	234.805.250,00			234.805.250,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.999.662.716,00	21.457.494.416,52	12.463.766.042,25	20.993.391.090,27
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	3.224.039.000,00		3.224.039.000,00
	JUMLAH BEBAN HIBAH	19.511.351.643,82	38.047.262.686,57	14.158.113.512,07	43.400.500.818,32

❖ **Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS**

Jumlah beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek pada Dinas Pekerjaan Umum Ddan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 114.352.600,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 363.190.626,00.

❖ **Beban Ekstrakomtabel**

Jumlah beban Ekstrakomtabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 44.927.237,62.

4.3.3 Surplus/ Defisit LO

Surplus/defisit Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 adalah selisih antara pendapatan LO dengan beban operasional LO sebesar (239.188.578.014,78) dan tahun 2022 sebesar (Rp. 217.328.778.179,23).

4.4. Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1 Ekuitas Awal

Merupakan ekuitas akhir Neraca per 31 Desember 2022 yang menjadi ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp. 1.695.407.943.550,89.

4.4.2 Surplus/ Defisit Laporan Operasional

Surplus/defisit Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 desember 2023 adalah selisih antara pendapatan LO dengan beban operasional LO sebesar (239.188.578.014,78) dan tahun 2022 sebesar (217.158.591.924,23).

4.4.3 Dampak Kumulatif akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 desember 2023 adalah :

➤ **Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi nilai persediaan sebesar (13.491.216,00) adalah Koreksi Kelebihan Bayar persediaan barang diserahkan ke masyarakat/ lembaga

➤ **Koreksi Ekuitas Aset Tetap**

Koreksi ekuitas aset tetap sebesar (6.576.538.179,80) adalah koreksi yang diakibatkan mutasi keluar aset tetap:

No.	Uraian	Koreksi Aset Tetap	Koreksi Penyusutan
1	Akibat mutasi masuk		
	Koreksi Ekuitas Mutasi Alat Angkutan	28.483.333,33	
	Koreksi Ekuitas Mutasi Komputer	37.167.136,36	(14.827.142,42)
	Koreksi Ekuitas Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.726.193.938,62	
	Koreksi Ekuitas Mutasi Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya		(314.887.793,28)
	Koreksi Ekuitas Mutasi Jalan dan Jembatan		(1.170.352.255,90)
	Sub Jumlah	7.791.844.408,31	(1.500.067.191,60)
2	Akibat Mutasi keluar		
	Koreksi Ekuitas Mutasi Alat Komputer	(44.953.972,61)	
	Koreksi Ekuitas Penyusutan Angkutan		28.483.333,33
	Koreksi Ekuitas Penyusutan Komputer		26.774.136,78
	Koreksi Ekuitas Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi		
	Koreksi Ekuitas Penyusutan Bangunan Gedung		2.497.127.129,96
	Koreksi Ekuitas Penyusutan Aset Tetap Jalan dan Jembatan		1.908.131.765,39
	Koreksi Ekuitas Penyusutan Barang Bercorak Kesenian Lainnya		49.916.000,00
		(1.170.352.255,90)	
	Sub Jumlah	(1.215.306.228,51)	4.510.432.365,45
	Jumlah Koreksi Aset tetap dan penyusutan	(6.576.538.179,80)	3.010.365.173,85

- **Koreksi Ekuitas Penyusutan Aset Tetap**
Koreksi ekuitas penyusutan diakibatkan mutasi keluar masuk dan koreksi lain sebesar Rp. 3.010.365.173,85 sebagaimana tabel di atas.
- **Koreksi Kewajiban Jangka Pendek**
Koreksi kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,00 akibat koreksi masuk dan keluar.

4.4.4 RK-PPKD yang harus dieliminasi adalah sebesar Rp. 228.994.098.971,40

4.4.5 Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.681.633.800.285,57 dan 2022 sebesar Rp1.695.436.014.288,89.

B A B VI

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

6.1 Domisili dan SOTK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Dinas baru penggabungan dari Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dan dikukuhkan pada tanggal 31 Desember 2021. Terletak di Jalan Lingkar Mupa – Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara.

6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaa urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan perundangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga gambaran singkat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dijelaskan didalam penjelasan pos-pos laporan keuangan, baik realisasi Pendapatan dan Belanja yang tergambarkan melalui Laporan Realisasi Anggaran, posisi kekayaan dan kewajiban melalui laporan keuangan Neraca per Desember 2023. Beban yang tergambarkan secara akrual melalui Laporan Operasional serta Perubahan Ekuitas dapat dijadikan dasarkan dalam pengukuran kinerja dan sebagai bahan didalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.